

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN BUKIT RAYA

*Rizka Ayu Silvia S.¹ & Ahmad Fitra Yuza²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharuddin Nasution No.13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: rizkaayusilvia.s@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) policy for the poor in Air Dingin Village, Bukit Raya District. BLT is a social assistance program from the government that aims to reduce the economic impact on the underprivileged. However, in its implementation, various obstacles were found, such as inaccurate recipient targets, lack of socialization, and minimal coordination between the central government, regional governments, and implementers at the village level. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe in depth how the BLT policy is implemented and the challenges faced. The results of the study indicate that factors such as unclear standards and policy targets, limited human and financial resources, and weak supervision and communication between agencies are obstacles to the effectiveness of the program. In addition, there are still recipients who do not meet the criteria, while some people who are entitled do not receive assistance. Based on these findings, this study recommends improvements in the recipient data collection mechanism, increased coordination between agencies, and strengthened transparency and accountability in the BLT distribution process. Thus, it is hoped that the BLT policy can be more targeted and provide optimal impacts on the welfare of the poor in Air Dingin Village.

Keyword: *Policy Implementation, Direct Cash Assistance, Poverty, Policy Evaluation*

PENDAHULUAN

Secara umum kemiskinan bukan semata-mata karena pendapatan yang kurang beragam masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia karena ketiadaan pendapatan, kekuasaan dan pilihan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Oleh karena itu, profil kemiskinan secara keseluruhan didefinisikan oleh pendapatan rendah, kondisi kesehatan buruk, pendidikan rendah dan keahlian terbatas, akses terhadap tanah dan modal rendah. sangat rentan menghadapi kesulitan ekonomi, bencana alam, konflik sosial dan resiko lainnya, partisipasi rendah dalam proses pengambilan kebijakan, serta keamanan individu yang sangat kurang. Begitu pula menurut Anggraeni, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Ari Khomsan:2015).

Bantuan Langsung Tunai di perkenalkan kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 untuk menanggulangi kenaikan harga bagi masyarakat miskin. Program ini dicetus oleh Jusuf Kalla yang waktu itu terpilih menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya berdasarkan intruksi presiden nomor 12, digalakanlah Program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada 2005

hingga 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu pemerintah membuat kebijakan program BLT dalam upaya membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi terjadi yang diterima oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya Rp 300.000-, selama tiga bulan berikutnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, dan hampir miskin. Pembagian BLT di Kelurahan Air Dingin berupa beras 10Kg dan ada juga yang berupa uang Rp. 100.000,-/bulan. Kriteria penerima BLT sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kriteria calon penerima BLT adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.Kehilangan mata pencaharian. 2.Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit lama dan kronis atau difabel. 3.Keluarga yang tidak menerima bantuan PHK/pemilik kartu Prakerja. Sasaran khusus untuk penerima BLT yaitu: 1.Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 2.Kehilangan mata pencaharian. 3.Belum terdata (exclusion error). 4.Mempunyai keluarga yang rentan sakit/kronis.

Penyaluran BLT telah disusun Bappenas dan dilaksanakan oleh PT Pos dan BRI. Selain itu sebagai bentuk pengawasan, dilibatkan juga unsur perangkat pemerintah, RT/RW, dan karang taruna serta melibatkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPK), Advokasi pemerintah daerah, dan Depdagri.

Berdasarkan atas data dan informasi yang diperoleh peneliti selama dalam proses observasi awal ke sejumlah kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Raya dan dari hasil wawancara dengan beberapa kepala lurah dan staf di Kecamatan Bukit Raya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat miskin terkait dengan pelaksanaan program BLT tersebut, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini Sebagian besar kelurahan di Kecamatan Bukit Raya belum mampu menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional, (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya). Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan RT/RW setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi perekonomian warganya. Alasan mengapa kriteria penerima miskin dinilai sulit diterapkan karena: Pertama, kondisi kehidupan warga masyarakat yang mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga pihak kelurahan merasa kesulitan untuk mencari penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya). Kriteria penerima BLT dinilai sudah tidak mampu menjawab kondisi kehidupan masyarakat saat ini, yang layak untuk menerima BLT. Oleh sebab itu, tidak heran banyak ditemukan penerima BLT yang tidak termasuk dalam salah satu syarat, misalnya jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/kayu murahan, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, Masalah ini termasuk kedalam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam kriteria pemerataan dan ketepatan. Kedua, masih ditemukannya beberapa kelurahan yang belum menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan atas kriteria nasional. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sosialisasi kriteria program kepada pihak kelurahan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa kelurahan tidak mengetahui apa yang menjadi syarat penerima BLT secara nasional, melainkan lebih menggunakan data lain yang dinilai cukup menunjang untuk menentukan kriteria

penerima BLT, seperti mengacu kepada data yang digunakan oleh tim kader posyandu setempat, atau lebih mempercayakan persoalan teknis penentuan penerima BLT kepada RT/RW setempat yang lebih didasarkan pada pemikirannya saja (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya), Masalah ini termasuk kedalam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam kriteria responsibilitas. Ketiga, dalam pembagian pun petugas merasa kesulitan karena tidak sedikit warga di Kecamatan Bukit Raya yang menerima BLT tidak mempunyai identitas diri yang digunakan sebagai tanda bukti pengambilan dana bantuan pemerintah tersebut. Dan penerima BLT Ini tidak bisa diwakilkan kepada saudara atau orang lain, harus dengan orang yang bersangkutan tersebut yang sesuai dengan data yang ada pada petugas Kecamatan Bukit Raya dan PT. Pos di Kecamatan Bukit Raya (sumber: hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan, Air Dingin Kecamatan Bukit Raya), Masalah ini termasuk kedalam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam kriteria efisiensi.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Menurut (Moleong, 2010), penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana Kelurahan untuk masyarakat miskin. Sumber data yang digunakan akan diambil dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen dan arsip yang relevan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat lebih fleksibel dan responsif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan serta perubahan pola dan nilai yang berkembang di masyarakat (Moleong, 2002).

Karena Penelitian Kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2)

PEMBAHASAN

Adapun teori digunakan adalah teori dari Van Meter & Van Horn yang mana terdapat indikator sebagai berikut: 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik Organisasi pelaksanaan 4. Komunikasi antar organisasi 5. Disposisi atau sikap para pelaksanaan 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn, standar serta sasaran kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa ada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian terhadap sejauh mana standar dan sasaran tersebut dapat tercapai.

Standar dan Sasaran Kebijakan pencapaian tugas secara tepat yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Salah satu yang harus dilihat dari keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam Standar dan Sasaran Kebijakannya. Dimana penulis memiliki beberapa item penilaian dalam melihat tingkat keberhasilan atau tugas yang diberikan kepada Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Standar dan Sasaran Kebijakan adalah sebagai berikut:

Aturan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dengan adanya aturan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya dapat memberikan sembako pada masyarakat miskin/ masyarakat yang kurang mampu. Program Bantuan Langsung Tunai ini dapat memberikan sedikit keringanan bagi masyarakat melalui bantuan yang diberikan tersebut. Untuk melihat adanya aturan dari program Bantuan Langsung Tunai maka penulis uraikan hasil wawancara dengan key informan dan informan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih, selaku Kepala Lurah Air Dingin, mengungkapkan bahwa:

“Aturan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), kalau untuk kelurahan air dingin alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja, jadi kalau untuk aturan semua sudah sesuai aturan, kita sesuaikan komponen yang ada di kemensos.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita, Sekretaris Lurah Kelurahan Air Dingin, mengungkapkan bahwa:

“Menurut kami Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Air Dingin berjalan dengan baik, bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, dan bisa meringankan beban, pada prinsipnya bagus dalam bidang ekonomi, program ini diberikan langsung pada masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kecamatan bukit raya.” (11 Februari 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat penerima BLT memberi tanggapan seperti berikut:

“Menurut saya aturan nya sudah pas sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, juga sasaran penerima BLT tetap pada yang ingin dituju, tidak adanya masalah antara masyarakat yang menerima BLT tersebut. Kami dari masyarakat golongan kebawah dengan adanya program tersebut merasa sangat diringankan oleh hal ini.” (11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa adanya aturan ini bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan dan menerima program BLT lantaran aturannya sudah jelas. Dengan adanya aturan yang jelas juga dapat membantu pengelolaan BLT dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat penerima BLT memberi tanggapan seperti berikut:

“Menurut saya aturan nya sudah pas sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, juga sasaran penerima BLT tetap pada yang ingin dituju. Tetapi ada Sebagian masyarakat yang

tidak dapat bantuan tersebut di karenakan kurang tepatnya sasaran pada saat RT/RW mendata nama-nama masyarakat yang kurang mampu. Kami dari masyarakat golongan kebawah dengan adanya program tersebut merasa sangat diringankan oleh hal ini.” (11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa adanya aturan ini bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan dan menerima program BLT lantaran aturannya sudah jelas. Dengan adanya aturan yang jelas juga dapat membantu pengelolaan BLT dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar memberi tanggapan berikut:

“Menurut saya aturannya belum cukup jelas karena seharusnya masyarakat yang kurang mampu seperti saya tidak terdaftar karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbarui dan Petugas pendataan (RT/RW atau kelurahan) mungkin tidak mengetahui kondisi ekonomi warga secara akurat, sehingga ada yang terlewat.” (11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil observasi di atas peneliti di Kelurahan Air Dingin terkait dengan indikator satndar dan sasaran kebijakan, dapat menjelaskan bahwa aturan ini belum cukup jelas dan yang seharusnya masyarakat yang layak menerima bantuan tidak terdaftar dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbarui dan Petugas pendataan (RT/RW atau kelurahan) mungkin tidak mengetahui kondisi ekonomi warga secara akurat, sehingga ada yang terlewat. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa aaturan cukup jelas, masyarakat Non-penerima BLT yang dikarenakan memang tidak memenuhi kriteria biasanya karena mereka penduduk pindahan, tidak memiliki identitas resmi, KTP/KK-nya berbeda dengan lokasi tinggal, mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.

Sasaran dalam Program BLT

Sasaran dalam program BLT tersebut sudah tepat dari masyarakat miskin/masyarakat yang kurang mampu. Untuk melihat bagaimana sasaran dalam program BLT apakah sudah berjalan lancar maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan key informan dan informan sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Suci Trianingsih sebagai Kepala Lurah Kelurahan Air Dingin mengatakan bahwa:

“Kalau untuk sasaran sampai sekarang sudah tepat, cuman kalau seandainya ini ada warga yang meninggal itu diberikan kepada anaknya, jadi kalau untuk sasaran tetap tepat pada sasaran karna syarat dari Dinsos ini kita bersyarat warga itu harus didalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Karna kami tidak ingin program BLT ini jatuh ditangan yang salah untuk kerena itu kami berusaha sebaik mungkin dalam hal ini.” (11 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nira Yenita selaku Sekretaris Lurah di Kelurahan Air Dingin mengatakan bahwa:

“Sasaran penerima program BLT sampai sejauh ini tetap kepada yang ingin dituju, sejauh ini belum ada ada komplain yang masuk, semisal ada yang komplain kami akan menjelaskan dengan prosedur yang ada”. (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat penerima BLT mengatakan bahwa: “Sampai saat ini sasaran dalam penerimaan BLT sudah cukup baik. Saya berterimakasih kepada pihak pengelola karna bantuan ini ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah” (11 Februari 2025)

Hasil Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat penerima BLT mengatakan bahwa:

“Penerimaan BLT tetap pada sasaran dan kami berterimakasih kepada pihak pengelola karna bantuan ini ditujukan kepada masyarakat golongan menengah kebawah seperti kami ini.” (11 Februari 2025)

Hasil Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Kalau untuk sasaran sampai sekarang belum tepat, seharusnya masyarakat yang kurang mampu seperti saya tidak terdaftar karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbarui dan Petugas pendataan (RT/RW atau kelurahan) mungkin tidak mengetahui kondisi ekonomi warga secara akurat, sehingga ada yang terlewat.” (11 Februari 2025)

Dari observasi diatas penulis simpulkan sasaran dari penerima BLT sudah tepat pada sasarnya. dan sebagian mengatakan belum tepat karena masih ada masyarakat yang kurang mampu tidak menerima manfaat, dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum diperbarui dan Petugas pendataan (RT/RW atau kelurahan) mungkin tidak mengetahui kondisi ekonomi warga secara akurat, sehingga ada yang terlewat. Sebaiknya Petugas pendataan (RT/RW atau kelurahan) lebih akurat pada saat mendata masyarakat yang kurang mampu supaya kinerja pihak pengelola membuat sasaran dari penerima BLT tersebut terlaksana dengan baik dan tepat. Dan sebagian ada yang tidak memenuhi kriteria dikarenakan mereka penduduk pindahan, tidak memiliki identitas resmi, KTP/KK-nya berbeda dengan lokasi tempat tinggal.” (11 Februari 2025)

Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup setiap tahap implementasi yang bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan yang telah disepakati secara politik. Di samping sumber daya manusia, faktor finansial dan waktu juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan tugas dan perkerjaan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator sumber daya ini sebagai berikut:

Tersedianya SDM didalam program BLT

Program bantuan langsung tunai adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong dalam golongan menengah ke bawah, dalam upaya mengatasi kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program BLT menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Pasalnya, tanpa adanya SDM yang memadai, program ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih sebagai Kepala Lurah Kelurahan Air Dingin mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia di Kelurahan Air Dingin sendiri bisa dikatakan cukup baik. Program ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk masyarakat terutama bagi masyarakat golongan menengah kebawah dalam upaya mengatasi kemiskinan. Jadi kami selaku yang menjalankan program tersebut harus lebih berkualitas untuk memenuhi SDM tersebut.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita selaku Sekretaris Lurah Air Dingin, mengatakan bahwa:

“Sedangkan menurut saya Sumber daya manusia di Kelurahan Air Dingin sendiri bisa dikatakan cukup baik. Karena kami selaku yang menjalankan program harus memberikan SDM berkualitas untuk masyarakat tersebut.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat sangat menyadari kurangnya sumber daya manusia dalam mengetahui teknologi masa kini. Untungnya petugas yang menjalankan program tersebut melayani dan memberikan informasi yang sangat jelas sehingga kami memahami.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan bahwa:

“Menurut saya Sumber daya manusia yang berada di Kelurahan Air Dingin saya rasa sudah cukup baik dan cukup jelas semoga kedepannya lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar. ” (12 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Banyak warga yang belum menerima bantuan karena kurangnya informasi tentang sumber daya yang ada.semoga dari pihak yang menjalankan program bantuan tersebut seperti RT/RW dan kelurahan lebih teliti pada saat mendata masyarakat yang membutuhkan dan semoga ada kebijakan dalam perbaruan (DTKS) supaya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan segera terdaftar.” (12 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan terkait dengan indikator Sumber Daya Manusia yang berada di Kelurahan Air Dingin sudah cukup baik, hanya saja untuk masyarakat golongan menengah kebawah kurang mengetahui konsep teknologi masa kini karena minimnya standar pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah kebawah.

Tersedianya fasilitas di dalam program BLT

Fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program BLT. Keberadaan fasilitas dan pelayanan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung keberhasilan suatu program tertentu. Untuk mengevaluasi fasilitas yang telah tersedia dan berjalan dengan efektif, peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suci Trianingsih selaku Kepala Lurah Kelurahan Air Dingin mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kami dari pihak Kelurahan Air Dingin sudah memberikan bantuan fasilitas untuk memenuhi pelayanan dari program BLT seperti penyediaan tempat pelayanan dan

pembuatan kartu untuk penerimaan program BLT” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita selaku Sekretaris Lurah mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Kelurahan sudah memberikan bantuan fasilitas untuk memenuhi pelayanan dari program BLT seperti penyediaan tempat pelayanan dan pembuatan kartu untuk penerimaan program BLT.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan:

“Sejauh ini fasilitas yang disediakan dari pihak penyelenggara program BLT sudah baik dan kami juga mendapatkan pelayanan yang baik dari mereka.” (12 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat yang belum menerima bantuan serta keterbatasan fasilitas yang tersedia. Saya berharap ada solusi terbaik dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar masyarakat yang layak tapi belum terdaftar seperti saya bisa merasakan manfaat yang sama.” (12 Februari 2025)

Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti dapat simpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dari program BLT sudah cukup baik, hanya saja ada sebagian masyarakat yang belum menerima bantuan dan yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan serta kurangnya informasi mengenai fasilitas yang tersedia sebaiknya lebih di pastikan lagi pada saat RT/RW mendata masyarakat.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana memiliki fokus utama pada agen pelaksana, yang mencakup organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting, karena kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik agen pelaksana yang sesuai dan tepat. Selain itu, hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang menuntut disiplin dan ketat dari para pelaksana. Dalam konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang memiliki pendekatan demokratis dan persuasif. Tak kalah penting, batasan atau luas wilayah juga merupakan pertimbangan krusial dalam menentukan agen pelaksana kebijakan tersebut.

Karakteristik organisasi pelaksana adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan atau yang sedang dijalankan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator karakteristik organisasi pelaksana sebagai berikut:

Adanya SOP dalam program BLT

SOP atau Standar Operasional Prosedur, merupakan pedoman yang penting untuk memastikan bahwa implementasi program BLT dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan SOP dalam program ini sangatlah krusial. Untuk memahami lebih dalam mengenai peran dan fungsi SOP dalam program BLT, Peneliti melaksanakan wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat secara langsung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih sebagai Kepala Lurah Kelurahan Air

Dingin mengatakan bahwa:

“Tidak semua SOP yang ada dapat di terapkan di tengah masyarakat, seperti halnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena sebagian masyarakat golongan menengah kebawah ada yang tidak memahami teknologi seperti zaman sekarang.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita sebagai Sekretaris Lurah mengatakan bahwa:

“dari SOP yang ada telah kami terapkan dengan sebaik mungkin guna untuk mengoptimalkan kinerja dari kami dalam menjalankan program BLT tersebut.” (11 Februari 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan bahwa:

“Sejauh yang saya lihat dari pihak yang bertugas dalam menjalankan program ini sudah cukup baik, mereka menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang ada di program mereka.” (12 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan bahwa:

“Pihak yang bertugas menjalankan program ini sudah cukup baik dalam menerapkan SOP yang ada. Semoga kedepannya program ini berjalan dengan lancar dan efektif.” (12 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan menyadari bahwa keterbatasan informasi mengenai SOP menyebabkan beberapa masyarakat belum mendapatkan manfaat. Sebabeiknya bagi petugas yang menjalankan program tersebut lebih efektif pada saat mendata, dan saya berharap ada perbaruan untuk data DTKS supaya belum terdaftar di data tersebut segera terdaftar dan mendapatkan bantuan tersebut.” (12 Februari 2025)

Berdasarkan hasil dari observasi diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya Terdapat Standar Operasional Prosedur yang jelas, yang telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program BLT tersebut. Tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dikarenakan belum terdaftar dan tidak memenuhi kriteria dan kurangnya pemahaman mengenai SOP yang ada. Sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat dapat kita simpulkan mereka menjalankan program tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dapat diartikan sebagai interaksi antara individu-individu. Organisasi yang harus dipahami oleh individu-individu yang bertugas sebagai pelaksana. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan standar dan tujuan tersebut kepada para pelaksana dengan cara yang jelas. Penyampaian informasi mengenai standar dan tujuan ini harus konsisten dan seragam, agar pesan yang diberikan dari berbagai sumber informasi tidak menimbulkan kebingungan. Dengan kata lain, komunikasi antar organisasi melibatkan Komunikasi antar individu dalam suatu organisasi melibatkan jaringan pesan yang saling terhubung berkaitan dan saling

bergantung. Adapun unsur pertanyaan pada indikator komunikasi antar organisasi ini adalah sebagai berikut:

Kerjasama yang dilakukan di dalam program BLT

Didalam penerapan program BLT berkerja sama dengan kementerian sosial. Kerja sama dalam suatu program sangatlah di perlukan agar program tersebut berjalan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, program ini harus dilaksanakan dengan tepat menurut sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan dalam program BLT ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa key informan dan informan sebagai berikut:

Berdarkan hasil wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih sebagai Kepala Lurah Kelurahan Air Dingi mengatakan bahwa:

“Sudah efektif kerja sama yang telah kami lakukan berjalan dengan baik, baik terhadap pihak pengelola, pendamping dan juga kepada masyarakat semua berjalan dengan baik” (11 Februari 2025)

Selanjutnya peneliti melakukan hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita selaku Sekretaris Lurah mengatakan bahwa:

“Sejauh ini berjalan dengan baik kerja sama yang kami lakukan berjalan dengan sebagaimana mestinya, meskipun kadang terjadi perdebatan dari masing-masing pihak, seperti halnya perbedaan pandangan dan pendapat namun hal itu bisa teratasi.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat penerima BLT mengatakan bahwa:

“Kerja sama menurut saya baik-baik saja, kami dari pihak masyarakat merasa terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola.” (14 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat yang menerima BLT mengatakan bahwa:

“Kerja sama sudah cukup baik, kami selaku masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Semoga untuk kedepannya lagi program tersebut terus berjalan dengan lancar.” (14 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Saya sangat kecewa karena tidak mendapatkan bantuan, padahal saya sangat membutuhkannya. Kami juga tidak dapat informasi mengenai adanya kerja sama dalam program BLT ini. Sehingga tidak tahu bagaimana cara mendaftar, harapan saya kedepannya ada sosialisasi yang baik agar seluruh masyarakat yang berhak bisa menerima manfaat secara adil.” (14 Februari 2025)

Berdasarkan hasil dari observasi diatas peneliti dapat menyimpulkan kerja sama yang dilakukan dalam program BLT di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, sebagian sudah dapat dikatakan terjalin dengan baik dan salah satu dari masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut tapi tidak terdaftar mengatakan belum mengetahui bagaimana proses kerja sama yang dilakukan dalam program BLT.

Adanya Koordinasi dalam Program BLT

Koordinasi yang menangani Program BLT dalam pengimplemetasi program BLT tersebut dengan pembentukan beberapa pihak yang bertanggung jawab seperti pengelola dan juga pendamping melakukan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana koordinasi dari penyelenggara program BLT tersebut dengan beberapa key informan dan informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suci Trianingsih selaku Lurah Kelurahan Air Dingin:

“Koordinasi dari pihak kami kepada msyarakat sudah berjalan dengan baik, kami melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan mengerti bagaimana alur dari pengurusan persyaratan penerima program bantuan tersebut.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Nira Yenita selaku Sekretaris Lurah Air Dingin mengatakan bahwa:

“Koordinasi kami cukup baik, kami selalu menyampaikan informasi-informasi yang kami dapatkan kepada masyarakat dengan cepat, agar tidak terjadinya kesalah pahaman yang terjadi antara kami dan masyarakat.” (11 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku masyarakat penerima bantuan BLT mengatakan bahwa:

“Saya rasa cukup baik, kami merasakan koordinasi dari pihak penyelenggara selaku pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi sudah cukup baik.” (14 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku Non-penerima yang merasa layak tapi tidak terdaftar mengatakan bahwa:

“Kami tidak mengetahui adanya koordinasi di dalam program BLT ini, sehingga tidak mengetahui bagaimana cara mendaftar atau mendapatkan bantuan.” (14 Februari 2024)

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan koordinasi dalam program BLT sudah berjalan dengan cukup baik walaupun salah satu dari masyarakat kelurahan air dingin yang merasa layak mendapatkan bantuan tapi tidak terdaftar, seharusnya dari pihak RT/RW yang lebih mengetahui kondisi masyarakat pada saat mendata lebih mengetahui siapa yang seharusnya layak menerima manfaat tersebut dengan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur tentang siapa yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui beberapa indikator yang digunakan untuk analisis, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Dalam analisis terhadap standar dan sasaran Kebijakan, dapat disimpulkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah tepat sasaran. Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Penyaluran bantuan ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, karena masih terdapat masyarakat yang kurang mampu dan belum merasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh informasi Yang belum terdaftar dalam Basis Data Kesejahteraan Sosial. diperbarui dan kurang akuratnya informasi yang diperoleh petugas pendataan, seperti RT/RW atau kelurahan, mengenai

kondisi ekonomi warga. Akibatnya, beberapa individu yang seharusnya mendapatkan bantuan terlewatkan.

2. Dalam analisis terhadap Sumber daya di Kelurahan Air Dingin sudah cukup baik, hanya saja untuk masyarakat golongan menengah kebawah kurang mengetahui konsep teknologi masa kini karena minimnya standar pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Sedangkan sumber daya dari segi fasilitas yang telah tersedia sudah berjalan dengan efektif.
3. Karakteristik organisasi pelaksanaan pertanggungjawaban program BLT di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya telah berjalan dengan cukup baik dan jelas. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang layak mendapat bantuan tetapi belum terdaftar, serta belum memenuhi kriteria. Mereka juga belum sepenuhnya mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik.
4. Komunikasi antar organisasi dalam program BLT telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya berkoordinasi dengan optimal.
5. Disposisi sikap para pelaksana menunjukkan bahwa respons terhadap program bantuan BLT di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, cukup baik. Namun, ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui proses penyaluran bantuan ini, disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak terdaftar dan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan respons yang sangat positif dari penyalur dan penerima bantuan. Program ini terbukti efektif dalam membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). Metode penelitian kuantitatif: Untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). . Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. (2012). . Penelitian Kualitatif. Kencana Perdana Media Grup.
- Edi, S. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Wirata, G. (2022). Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan.
- Mantra, I. B. (2008). Filsafat penelitian dan metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Imawan, W. (2008). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Bappenas, Jakarta.
- Pressman, J. L. and W. (2012). . Implementation. Barkley and Los Angeles. University of California Press.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.

- Syaukani, H. R. (2004). *Dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian Pustaka Baru Press*.
- Suryadi. (1975). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2005). *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. *Mondar Maju, Bandung*.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C. . (1975). . *The Policy Implementation Process*. Administration And Society.
- Agustiono, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Alfabeta)*.
- Dwijowijoto, R. N. (2008). *Public Policy; Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi. Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gie, T. L. (2013). *Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah (Rineka Cip)*. Imawan, W. (2008). *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Bappenas, Jakarta. Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*.
- Ndraha, T. (2005). *Pemerintahan dan Pembangunan (Rineka Cip)*. Nugroho. (2003). *Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press.
- Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- Jatinangor. Setya. (2001). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar (P. Pelajar (ed.)).
- Sumaryadi. (2010). *Teori Administrasi Negara (Graha Ilmu)*.
- Syafiie, D. H. I. . (2011). *Pemerintah dan Pemerintahan: Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. (PT. Rineka). Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*.
- Wijaya, A. dan. (2012). *Ilmu Pemerintahan: Konsep dan Teori Dasar (Graha Ilmu)*. Zulkifli. (2005). *Ilmu Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Praktik (PT Rineka)*.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). *Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). *Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).
- Rauf, R. (2017). *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 221-232.

Rizal, A. (2022). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, INSITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).